

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha produktif yang terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan pengertian tersebut, UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai unit usaha produktif berskala mikro, kecil, atau menengah yang dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha. Pada penelitian ini, UMKM yang dimaksud adalah pelaku usaha yang berada di Kecamatan Cilacap Utara dan menjadi unit analisis untuk mengkaji literasi keuangan, inklusi keuangan, serta perilaku pengelolaan kas.

B. Teori of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi niat dan tindakan seseorang. Pada konteks penelitian ini, TPB relevan karena memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat memengaruhi perilaku pengelolaan kas pelaku UMKM. Menurut TPB (1991), perilaku seseorang ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan). Literasi keuangan yang baik dapat membentuk sikap positif pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan kas, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola keuangan usaha. Inklusi keuangan mendukung *perceived behavioral control* dengan menyediakan akses dan sarana keuangan yang memungkinkan pelaku UMKM menjalankan keputusan keuangannya secara nyata. Selain itu, dorongan sosial atau program dari pemerintah dan lembaga keuangan dapat memengaruhi norma subjektif yang mendukung praktik pengelolaan kas yang sehat. Dengan demikian, TPB menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya berperan sebagai faktor eksternal, tetapi juga sebagai determinan psikologis yang memengaruhi niat dan perilaku aktual pelaku UMKM dalam mengelola kas usaha mereka.

Dalam konteks UMKM, sikap pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan kas akan membentuk kecenderungan mereka untuk

menerapkan praktik tersebut. Norma subjektif dapat berasal dari tekanan sosial seperti dorongan komunitas bisnis atau pelatihan dari pemerintah. Sementara itu, kontrol perilaku yang dirasakan sangat erat kaitannya dengan literasi keuangan (pengetahuan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan) dan inklusi keuangan (kemampuan aktual dalam mengakses layanan keuangan). Semakin tinggi literasi dan inklusi keuangan yang dimiliki, maka semakin besar peluang pelaku UMKM untuk merasa mampu dan termotivasi dalam mengelola kas secara efektif. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka logis dan empiris untuk memahami bagaimana kedua variabel tersebut membentuk dan mendorong perilaku pengelolaan kas pada UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM, khususnya pada pelaku usaha di Kecamatan Cilacap Utara. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai perilaku keuangan UMKM melalui penerapan *Theory of Planned Behavior* sebagai pendekatan analisis. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam merancang program peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara lebih tepat sasaran, agar UMKM memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola keuangan usaha mereka. Ruang lingkup penelitian mencakup pelaku UMKM di Cilacap Utara tanpa batasan sektor usaha, dengan fokus utama pada hubungan antara literasi, inklusi, dan

pengelolaan kas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memperkuat fondasi keuangan pelaku UMKM dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Cholisah & Suryandani, 2022)	Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kabupaten Rembang	Literasi Keuangan (X1), Sikap Keuangan (X2), Perilaku pengelolaan Keuangan (Y)	Literasi dan sikap keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM.
2.	(Pinem & Dwi, 2021)	Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pendapatan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pelaku UMKM di Depok Jawa Barat	Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2), Pendapatan (X3), Perilaku Pengelolaan Keuangan (Y)	Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan.
3.	(Lestari & Fauzi, 2026)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Teknologi Keuangan, Terhadap Perilaku Pengelola Keuangan pada Pelaku UMKM di Wilayah Surya Kencana.	Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2), dan Teknologi Keuangan (X3), Terhadap Perilaku Pengelola Keuangan (Y).	Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Teknologi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Pengelola Keuangan pada Pelaku UMKM.
4.	(Hutauruk et al., 2024)	Pengaruh Literasi keuangan, Inklusi Keuangan	Literasi keuangan (X1), Inklusi	Literasi keuangan, inklusi

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		dan Gender Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pelaku UMKM di Kota Medan	Keuangan (X2), dan Gender (X3) Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan (Y).	keuangan ,dan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM, baik secara parsial maupun simultan.
5.	(Suwendra et al., 2024)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Efikasi Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku Umkm Di Kabupaten Buleleng	Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2), dan Efikasi Keuangan (X3) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Y).	Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan efikasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan.
6.	(Elfina & Kannapadang, 2025)	Pengaruh Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pelaku UMKM di Makale Kabupaten Tana Toraja	Literasi Keuangan (X1), dan Inklusi Keuangan (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y)	secara simultan literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

D. Literasi Keuangan

1. Definisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsep keuangan UMKM. Menurut Pinem & Dwi, (2021) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pemahaman individu terhadap konsep keuangan, yang memungkinkan mereka mengelola keuangan secara efektif. Dengan literasi keuangan yang memadai, pemilik UMKM dapat menyusun rencana yang lebih baik, mengoptimalkan nilai waktu uang, serta meningkatkan keuntungan dan kualitas hidup. (Atikah & Kurniawan, 2024) Menurut Cholisah & Suryandani (2022), literasi keuangan penting untuk mencegah masalah keuangan di masa depan dalam bisnis.

Kemampuan untuk memahami dan mewujudkan situasi keuangan yang mempengaruhi keputusan keuangan seseorang disebut literasi keuangan. Selain itu, bisnis mendapat manfaat dari pengelolaan anggaran yang lebih baik, pengendalian biaya, dan pelaporan keuangan yang akurat, dapat membantu akses pinjaman, inovasi, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan (Cholisah & Suryandani, 2022).

Pada konteks UMKM, literasi keuangan merupakan kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara efektif yang mencakup aspek pengetahuan, dan keterampilan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis mereka.

UMKM berkontribusi pada perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Literasi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. (Puspita & Rosyadi, 2026). Dengan demikian literasi keuangan dapat dipandang sebagai salah satu determinan utama dalam meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

2. Faktor Literasi Keuangan

Faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan meliputi tingkat pendidikan, status mukim, tingkat pendapatan, dan status pekerjaan (Asari et al., 2023).

a. Faktor Pendidikan

Elemen utama yang berpengaruh terhadap literasi keuangan adalah tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini ditekankan karena saat menjalani pendidikan, seseorang pasti memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan, termasuk keterampilan dalam pengelolaan uang.

Pengalaman dan pengetahuan yang solid menciptakan banyak ide baru mengenai cara terbaik untuk bertindak, termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan agar tetap berada pada posisi yang aman secara finansial.

b. Status Mukim

Salah satu alasan mengapa literasi keuangan seseorang bisa tinggi status mukim. Menurut Alenda et al., (2021) , mereka yang tinggal sendirian di apartemen atau penginapan cenderung memiliki semangat dan ketahanan yang lebih, sehingga lebih mampu memahami masalah keuangan dibandingkan dengan mereka yang tinggal bersama keluarga di rumah.

Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang tinggal jauh dari keluarga cenderung akan lebih cepat mengambil inisiatif dalam mengelola keuangannya sendiri. Baik yang muda maupun yang tua, hal ini tidak menjadi penghalang, menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dalam mengatur semua aspek keuangan yang mereka miliki.

c. Tingkat Pendapatan

Status besaran penghasilan ternyata mempengaruhi pengetahuan mengenai keuangan. Hal ini kemudian berkaitan dengan tingkat partisipasi dalam keuangan. Untuk mencapai kestabilan finansial, sebaliknya sejumlah uang yang dimiliki disimpan di tempat yang aman, misalnya dengan menabung di bank, atau bahkan berinvestasi di pasar modal (Asari et al., 2023).

d. Status Pekerjaan

Tidak dapat disangkal bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi tingkat kemampuan literasi keuangan. Menurut penelitian ilmiah, individu dengan pekerjaan yang memerlukan pendidikan tinggi umumnya lebih mampu mengatur keuangan mereka. Oleh karena itu, latar belakang kerja seseorang dapat mempengaruhi seberapa halus mereka dalam mengelola keuangan (Asari dkk, 2023).

3. Indikator Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang atau kelompok dalam mengambil keputusan keuangan secara bijaksana. Kemampuan literasi keuangan adalah saat seseorang dapat memahami dan mengatur keuangan pribadinya dengan baik, memungkinkan mereka untuk. Mengambil keputusan keuangan yang mendukung kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Berdasarkan Oseifuah (2010) ada 3 indikator literasi keuangan:

- a. Pengetahuan Keuangan yang memahami tentang istilah dan konsep dalam bidang keuangan seperti suku bunga bank, kartu kredit, kebangkrutan, saham, dan layanan perbankan lainnya; mengetahui istilah dan konsep keuangan; mengetahui manfaat pajak dan

layanan pengelolaan pensiun; memahami berbagai sumber pendapatan keluarga; dan sejenisnya.

- b. Sikap keuangan merupakan seberapa besar minat atau perhatian seseorang terhadap usaha untuk meningkatkan pemahaman atau pengetahuan tentang masalah keuangan, seperti merencanakan program pensiun untuk karyawan, mematuhi kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah, atau memanfaatkan layanan perbankan saat bertransaksi di luar negeri.
- c. *Financial Behavior* (perilaku keuangan) diartikan sebagai usaha mengelola pengeluaran dan tabungan, serta menerapkan pembukuan akurat terhadap situasi keuangan pribadi seseorang, selain juga membentuk rencana keuangan untuk jangka panjang.
(Choerudin et al., 2023)

E. Inklusi Keuangan

1. Definisi

Berdasarkan (Peraturan Presiden Perpres Nomor 82 Tahun, 2016), inklusi keuangan dimaknai sebagai situasi dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan tepat waktu, mudah, dan aman serta dengan biaya yang terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan & Vaulia, 2022).

Keuangan inklusi merupakan situasi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan resmi yang berkualitas dengan cara yang tepat waktu, mudah, dan aman, serta dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ika et al., 2022).

Inklusi keuangan dapat mengatasi rendahnya literasi keuangan di Indonesia. Pada konteks ini inklusi keuangan yang efektif dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk perbesar usaha mereka. Pengetahuan tentang keuangan bagi pelaku UMKM akan memudahkan mereka dalam mengatur dan mendapatkan produk keuangan (Assanniyah & Setyorini, 2024).

Berdasarkan definisi diatas, dapat diartikan bahwa inklusi keuangan adalah suatu keadaan di mana masyarakat, termasuk para pelaku UMKM, memiliki akses yang mudah, aman, aman, tepat waktu,

dan terjangkau terhadap beragam layanan serta produk keuangan resmi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Inklusi keuangan memiliki peran keuangan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan untuk usaha, serta membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas manajemen keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

2. Tujuan Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap masyarakat pada suatu produk, lembaga dan layanan jasa keuangan. Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat lebih aman pada saat melakukan interaksi dengan lembaga keuangan. Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Meningkatnya ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

3. Manfaat Inklusi Keuangan

Dalam MIX Marcomm (2021) Redaksi OCBC NISP inklusi keuangan memiliki beberapa manfaat, berikut ini penjelasan dari manfaat inklusi keuangan yaitu:

a. Literasi keuangan meningkat

Saat masyarakat mampu mengakses produk atau layanan keuangan dengan mudah, maka secara tidak sadar masyarakat akan menerima paparan terkait finansial. Akhirnya, masyarakat akan semakin paham bagaimana dunia finansial bekerja, sehingga literasi finansialnya pun meningkat.

b. Masyarakat lebih mampu merencanakan keuangan

Keterbatasan akses finansial membuka kesempatan setiap orang agar mampu membuat perencanaan keuangan secara matang.

c. Pemerataan ekonomi meningkat

Keuangan inklusi membuat setiap orang menjadi terpapar produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini membantu dalam mengatasi masalah ekonomi di masyarakat.

d. Ekonomi negara semakin maju dan tumbuh

Begitu literasi keuangan masyarakat tinggi, masyarakat akan tahu cara terbaik mendapatkan modal usaha. Dengan demikian kualitas konsumsinya juga tinggi, sehingga turut meningkatkan jumlah konsumsi nasional, peningkatan konsumsi nasional akan meningkatkan pendapatan nasional. Perekonomian negara pun akan terus bertumbuh lebih baik dan berkualitas.

4. Indikator Inklusi Keuangan

Akses yang dimaksudkan untuk UMKM melibatkan kecakapan, pengetahuan, serta pemahaman dalam memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Sebaliknya, isolasi finansial sering berhubungan dengan persoalan sosial seperti pendapatan yang rendah, tingkat kejahatan yang tinggi, kondisi rumah yang kurang baik, kemampuan dasar yang terbatas, kekacauan rumah tangga, kesehatan yang kurang baik, dan kemiskinan.

Walaupun inklusi keuangan meliputi berbagai konsep, kepemilikan rekening masih menjadi petunjuk utama dalam menilai sejauh mana seseorang terlibat dalam inklusi keuangan. Dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memastikan masyarakat memiliki sarana untuk mengelola keuangan serta kehidupan mereka dengan baik. Inklusi keuangan memegang peran penting dalam memastikan akses yang luas terhadap barang dan

jasa keuangan berkualitas, serta memperkuat keterlibatan pelanggan di pasar melalui rantai pasokan.

Menurut (Cheston et al., 2016) definisi inklusi keuangan oleh *The Center for Financial Inclusion* melibatkan beberapa indikator:

- a. Akses ke layanan keuangan yang sangat sesuai, seperti kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran.
- b. Disediakan secara berkualitas tinggi, termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kecocokan, dan perhatian pada perlindungan konsumen.
- c. Mempertahankan kapabilitas, sebagai kemampuan, kesanggupan keuangan klien memiliki pengetahuan yang cukup dan dapat membuat keputusan untuk melakukan sesuatu.

F. Perilaku Pengelolaan Kas

1. Definisi Perilaku Pengelolaan Kas

Perilaku pengelolaan kas merupakan tindakan atau kebiasaan seseorang dalam mengelola penerimaan dan pengelolaan kas secara terencana agar kondisi keuangan usaha tetap stabil. Perilaku ini mencakup kegiatan seperti mencatat arus kas, menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pengelolaan kas yang baik membantu pelaku usaha menjaga likuiditas dan mengurangi risiko kesulitan keuangan. (Maisarah et al., 2025)

Menurut peneliti Sambayu dan Mangifera (2026), *finansial management behavior* merupakan perilaku pelaku usaha dalam mengambil keputusan dan melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab sehingga penggunaan dana menjadi lebih efektif dan mampu mendukung stabilitas keuangan usaha. Pada konteks UMKM, perilaku tersebut terlihat dari kedisiplinan dalam melakukan pencatatan keuangan, mengatur arus kas, menyusun anggaran, serta mengendalikan pengeluaran usaha. (Sambayu & Mangifera, 2026)

Larasaty, Makaryanawati, dan Furqorina (2021) menjelaskan bahwa perilaku pengelolaan keuangan merupakan perilaku yang mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan melalui pengetahuan keuangan, perencanaan keuangan, dan pengendalian diri sehingga

keputusan keuangan yang diambil menjadi lebih tepat. Perilaku tersebut berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha, termasuk dalam pengelolaan kas sehari-hari. (Larasaty & Makaryanawati, 2021)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, perilaku pengelolaan kas dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kebiasaan pelaku UMKM dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kas secara terencana, disiplin, dan bertanggung jawab melalui pencatatan transaksi, penyusunan anggaran kas, pengendalian pengeluaran, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta pemantauan saldo kas agar kegiatan operasional usaha berjalan lancar dan berkelanjutan.

2. Faktor Perilaku Pengelolaan Kas

Menurut Santoso et al, (2024) perilaku pengelolaan kas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan, sikap, pengalaman, dan keyakinan pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian terbaru, faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan serta menerapkannya dalam pengambilan keputusan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menyusun anggaran, mencatat transaksi, mengelola arus kas, serta

mengendalikan pengeluaran usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik pula perilaku pengelolaan kas yang dimiliki pelaku UMKM. (Azizah et al., 2024)

b. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan kemudahan akses dan pemanfaatan berbagai produk serta layanan keuangan formal, seperti rekening bank, kredit usaha, pembayaran digital, dan layanan keuangan lainnya. Akses terhadap layanan keuangan memudahkan pelaku UMKM melakukan transaksi, mengatur arus kas, memperoleh pembiayaan, dan menyimpan dana usaha dengan lebih aman. Semakin baik tingkat inklusi keuangan, semakin baik pula perilaku pelaku usaha dalam mengelola kas usahanya. (Azizah et al., 2024)

c. Sikap Keuangan (Financial Attitude)

Sikap keuangan merupakan cara pandang atau pola pikir seseorang terhadap pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana. Pelaku UMKM yang memiliki sikap keuangan positif biasanya lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran, membuat perencanaan keuangan, serta menjaga ketersediaan kas untuk kebutuhan usaha. Sikap yang baik akan mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan kas yang lebih bertanggung jawab. (Sumarni & Maswanto, 2026)

3. Indikator Pengelolaan Kas

Berbagai elemen pengelolaan keuangan, seperti perencanaan, penggunaan dana, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan, termasuk indikator pengelolaan keuangan, yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan akuntabel suatu organisasi, individu, atau institusi. Menurut Khadijah & Purba, (2021) Pengelolaan keuangan memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

a. Penyusunan Anggaran

Salah satu komponen penting dalam mengelola keuangan Usaha yaitu penggunaan anggaran. Indikator ini mengevaluasi manfaat dana usaha yang dialokasikan untuk operasional, pertumbuhan bisnis, dan pencapaian tujuan usaha. Perencanaan anggaran melibatkan penyusunan rencana rinci tentang bagaimana dana digunakan, termasuk alokasi untuk operasional, pemasaran, investasi, dan lainnya.

b. Pencatatan

Catatan tentang keuangan meliputi pemasukan, modal, pengeluaran, piutang, utang, dan modal. Proses ini menyalin semua transaksi keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran, dan beraksi sebagai fondasi untuk melacak, menilai, dan membuat keputusan bisnis yang layak.

c. Pengendalian

Pengendalian dalam sebuah usaha adalah menjamin semua aktivitas keuangan perusahaan dilaksanakan sesuai rencana anggaran, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Mengawasi aktivitas keuangan sangat penting untuk menjaga efisiensi, mencegah kesalahan, serta mendukung kelangsungan bisnis.

G. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2013) menyebutkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini :

H1 : Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

H2: Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

H3: Literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara.

H. Kerangka Berpikir

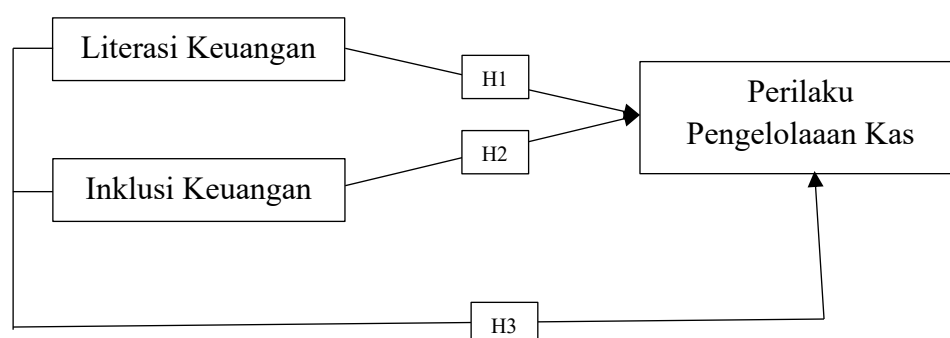
UMKM merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Agar usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kas usahanya. Pelaku pengelolaan kas yang baik dapat dilihat dari kebiasaan pelaku usaha dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta memantau saldo kas. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan pengelolaan kas secara optimal.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi perilaku pengelolaan kas adalah literasi keuangan. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai cara mengelola keuangan dengan baik. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih mampu membuat keputusan keuangan yang tepat, menyusun anggaran, melakukan pencatatan transaksi, dan mengendalikan arus kas usaha. Dengan demikian, semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin baik pula perilaku pengelolaan kas pelaku UMKM.

Selain literasi keuangan, inklusi keuangan juga diduga memengaruhi perilaku pengelolaan kas. Inklusi keuangan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai produk serta layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit

usaha, dan layanan pembayaran digital. Kemudahan akses tersebut dapat membantu pelaku UMKM mengelola transaksi, memperoleh pembiayaan, dan mengatur kas usaha secara lebih efektif. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, maka semakin baik pula perilaku pengelolaan kas yang dimiliki pelaku UMKM.

Hubungan antara literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perilaku pengelolaan kas didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, serta persepsi mengenai kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, literasi keuangan membentuk pengetahuan dan keyakinan pelaku UMKM dalam mengelola kas, sedangkan inklusi keuangan memberikan kemudahan untuk menerapkan pengelolaan kas melalui pemanfaatan layanan keuangan formal. Dengan demikian, kedua variabel tersebut diduga berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Keterangan :

H1 : Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

H2: Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

H3: Literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara.

I. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu maka berikut adalah hubungan antar variabel untuk dijadikan sebagai hipotesis penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah dengan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Kas

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep keuangan serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menyusun anggaran, melakukan pencatatan transaksi, mengelola arus kas, serta mengendalikan pengeluaran usaha. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin baik

pula perilaku mereka dalam mengelola kas usaha. (Sugiharto et al., 2024)

Hubungan tersebut juga didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut teori ini, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang akan membentuk sikap positif dan meningkatkan keyakinan dalam melakukan suatu perilaku. Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan membantu pelaku UMKM merasa lebih mampu mengelola kas usahanya sehingga mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan kas yang lebih baik.

Hasil penelitian Sugiharto et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM. Temuan serupa juga diperoleh oleh Munthay dan Sembiring (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi literasi keuangan pelaku UMKM, semakin baik pengelolaan keuangan usahanya.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1: Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Kas

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap berbagai produk dan layanan

keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, pembayaran digital, dan layanan perbankan lainnya. Kemudahan akses tersebut membantu pelaku UMKM melakukan transaksi secara lebih efektif, memperoleh modal usaha, menyimpan dana dengan aman, serta memantau arus kas usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, semakin baik pula perilaku pengelolaan kas pelaku UMKM. (Assanniyah & Setyorini, 2024)

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kemudahan memperoleh akses terhadap layanan keuangan meningkatkan *perceived behavioral control* atau persepsi kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal akan lebih mudah menerapkan praktik pengelolaan kas yang baik dibandingkan mereka yang memiliki akses terbatas.

Penelitian Assanniyah & Setyorini (2024) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Penelitian Hutaaruk et al. (2024) juga menemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pelaku UMKM.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di Cilacap Utara.

3. Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Kas

Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM mengelola keuangan usahanya. Literasi keuangan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan, sedangkan inklusi keuangan menyediakan akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung aktivitas usaha. Apabila keduanya dimiliki secara bersamaan, pelaku UMKM akan lebih mampu melakukan pencatatan transaksi, menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, serta menjaga kestabilan arus kas usaha. (Assanniyah & Setyorini, 2024)

Penelitian Budiasni & Ferayani (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM. Selain itu, Hutaeruk et al. (2024) juga menemukan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

**H3: Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Secara Simultan
Berpengaruh Terhadap Perilaku Pengelolaan Kas UMKM Di
Cilacap Utara.**